

BAB V

PENUTUP

Pada bab penutup tugas akhir dijabarkan mengenai kesimpulan, saran, dan implikasi penelitian. Simpulan berisi uraian singkat dari hasil penelitian dan pembahasan. Saran berisi saran bagi peneliti ketika melakukan penelitian selanjutnya, sedangkan implikasi penelitian kepada manajemen perusahaan untuk menghasilkan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil evaluasi yang telah dibahas tentang perhitungan PPh 21 bagi karyawan pada PT Petrokimia Gresik, maka kesimpulan dari hasil penelitian ini

1. Prosedur penerapan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 dari pendapatan kotor mencakup seluruh unsur gaji dan tunjangan yang diterima pekerja dari pemberian kerja, seperti gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, dan dikurangkan beban yang harus dibayarkan. Pengurangan ini untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Tarif yang dikenakan juga bervariasi tergantung pada besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan status pernikahan karyawan.
2. Perhitungan Menurut Direktur Jendral Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 penghasilan Pajak Penghasilan pasal 21 berasal dari seluruh komponen yang diterima karyawan, seperti gaji pokok, tunjangan tidak tetap, dan

penghasilan lainnya, tanpa pengurangan biaya jabatan. Selanjutnya hasil penghasilan bruto disesuaikan dengan tarif progresif sesuai lapisan tarif pada peraturan yang baru. Dua prosedur tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang mengatur tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu adanya penerapan perhitungan berdasarkan peraturan terbaru tersebut diharapkan dapat mempermudah proses dalam penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 yang dipotong. Berdasarkan penetapan peraturan terbaru tentang tarif pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 terhitung lebih tinggi jika dibandingkan dengan peraturan lama.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dengan topik perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21, maka penulis memberikan sedikit saran yang dimaksud untuk dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun saran-saran yang dikemukakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Bagi PT Petrokimia Gresik untuk lebih terus mempertahankan dan meningkatkan prosedur administrasi yang jelas untuk pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21, yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan akurasi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.
2. Bagi penelitian selanjutnya semoga dapat menjadi tambahan pengetahuan khususnya yang ingin meneliti dan memahami lebih dalam masalah perpajakan.

5.3 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian tentang perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 menghasilkan output perhitungan pada Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 yang telah dibahas perusahaan perlu memperbarui atau menyesuaikan sistem akuntansi dan prosedur perpajakan untuk memastikan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 sesuai dengan perhitungan peraturan terbaru. Dengan melakukan evaluasi dan perbaikan yang diperlukan, dapat digunakan PT Petrokimia Gresik untuk membantu mengevaluasi kembali hasil perhitungan perubahan peraturan pajak yang lama dan terbaru. PT. Petrokimia Gresik dapat mengurangi risiko terkena sanksi atau denda akibat ketidakpatuhan pembayaran pajak. Perusahaan dapat menambahkan pelatihan lebih lanjut bagi staf akuntansi dan staf keuangan dalam hal peraturan pajak terbaru dan praktik perhitungan yang benar. Pelatihan juga akan meningkatkan kompetensi karyawan dalam mengelola kewajiban pajak dan meminimalkan risiko kesalahan pencatatan.

Implementasi bagi pemerintah yaitu Direktur Jendral Pajak, terkait peraturan terbaru dapat digunakan sebagai edukasi dan sosialisasi yang efektif agar semua pihak yang terlibat memahami perubahan dan cara penerapannya. Ini dapat membantu mencegah kesalahan dan memastikan bahwa kewajiban perpajakan dapat mengurangi kesalahan dan potensi penghindaran pajak, yang pada akhirnya meningkatkan jumlah penerimaan pajak negara. Prosedur yang lebih efisien dalam PER-2/PJ/2024 dapat mempercepat proses pengumpulan pajak dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk memproses dan pelaporan. Efisiensi ini berpotensi meningkatkan arus kas negara.

DAFTAR RUJUKAN

- Andrean. (2023). Evaluasi Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus Pada Yayasan Mardi Wiyata).
- Hikmawati. (2017). Metodologi Penelitian. Depok: Rajawali Pers.
- Indriantoro & Supomo. (2018). Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
- Pemerintahan Indonesia. (2023). Penerimaan Pajak Februari 2023 Masih Sangat Kuat. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Pemerintahan Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. (2016). Direktorat Jendral Pajak.
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-05/PJ/2017 Tahun 2017 tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik. (2017). Direktorat Jendral Pajak.
- Permatasari, dkk. (2016). Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan tetap pada PT. Petrokimia Gresik.
- Resmi. (2019). Perpajakan Teori dan Kasus. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Safitri, I. I. (2021). Analisis Terhadap Kontribusi Pajak Reklame, Pajak. Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vol. 18 No. 01, April, 76
- Siga. (2023). Evaluasi Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi pada PT JKL).
- Tommy Hilman M.T., C. (2023). Mengenal Jenis Jenis Pajak di Indonesia 20. PINA.